

Kegiatan magang mahasiswa : prosedur pencatatan dan pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Nabila Fitri Noviyanti, Atik Emilia Sula

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Penulis korespondensi : Atik Emilia Sula

E-mail : atik.emilia@trunojoyo.ac.id

Diterima: 07 Mei 2026 | Direvisi: 01 Juni 2026 | Disetujui: 02 Juni 2026 | Online: 20 Juni 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Dalam pelaksanaannya, penerimaan retribusi parkir tidak hanya melalui proses pemungutan di lapangan, tetapi juga melalui tahap rekapitulasi dan pencatatan sebagai dasar penyusunan laporan penerimaan daerah. Ketelitian dalam proses pencatatan sangat diperlukan agar data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan dan pencatatan retribusi parkir yang diterapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan berdasarkan pengalaman magang, khususnya pada proses rekapitulasi penerimaan. Metode yang digunakan adalah observasi langsung terhadap alur administrasi yang berjalan, dokumentasi data penerimaan, serta keterlibatan langsung dalam proses rekapitulasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan retribusi parkir telah melalui tahapan pemungutan, penyetoran, dan rekapitulasi penerimaan. Namun, proses rekap masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan ketelitian untuk meminimalkan kesalahan pencatatan. Dengan administrasi yang lebih tertib, penerimaan retribusi parkir dapat lebih terkontrol dan mendukung peningkatan PAD secara lebih optimal.

Kata Kunci: retribusi parkir; prosedur; pencatatan; rekapitulasi; pendapatan asli daerah.

Abstract

Parking retribution is one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) managed by the Department of Transportation of Bangkalan Regency. In its implementation, parking retribution revenue is not only obtained through the collection process in the field, but also through the stages of recapitulation and recording as the basis for preparing regional revenue reports. Accuracy in the recording process is highly required to ensure that the reported data reflects actual conditions. Accordingly, this activity aims to identify the procedures for managing and recording parking retribution implemented at the Department of Transportation of Bangkalan Regency based on internship experience, particularly in the revenue recapitulation process. The method used is direct observation of the ongoing administrative flow, documentation of revenue data, and direct involvement in the recapitulation process. The results indicate that the parking retribution management procedure has gone through the stages of collection, deposit, and revenue recapitulation. However, the recapitulation process is still carried out manually, thus requiring a high level of accuracy to minimize recording errors. With more orderly administration, parking retribution revenue can be better controlled and support the optimization of Regional Original Revenue.

Keywords: parking retribution; procedures; recording; recapitulation; regional original revenue.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerah dan mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber PAD, salah satunya melalui pengelolaan retribusi daerah seperti retribusi parkir (Humairah et al., 2021). Retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti maraknya praktik parkir liar di tepi jalan yang belum terkelola dengan baik, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan daerah (Purnamasari, 2015).

Dalam pengelolaannya, retribusi parkir tidak hanya mencakup proses pemungutan di lapangan, tetapi juga meliputi penyeteroran dan pencatatan sebagai dasar pelaporan penerimaan daerah. Ketertiban administrasi dalam proses tersebut menjadi hal yang penting karena berpengaruh terhadap ketepatan data serta kualitas laporan keuangan (Rachman & Kumayas, 2020). Selain itu, efektivitas retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi dan pencatatan yang baik. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD akan lebih optimal apabila didukung oleh sistem yang tertib serta pengawasan yang memadai (Hermansyah & Tohardi, 2026). Di sisi lain, ketepatan pencatatan dan pelaporan penerimaan daerah juga berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Zega, 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir masih menghadapi kendala, seperti kurang optimalnya pengawasan terhadap petugas lapangan, keterlambatan penyeteroran hasil pungutan, serta pencatatan yang masih sederhana sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data (Rahmatilah et al., 2025). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan dan pencatatan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan retribusi parkir (Marau et al., 2025). Kondisi ini diperparah dengan masih ditemukannya praktik juru parkir liar yang menyebabkan sebagian penerimaan tidak masuk ke kas daerah, sehingga menghambat optimalisasi PAD (Widiarta, 2025).

Dalam konteks tersebut, peran Dinas Perhubungan sebagai pengelola retribusi parkir menjadi sangat penting, baik dalam pelaksanaan teknis, pengawasan, maupun pembinaan terhadap petugas parkir, guna memastikan ketertiban administrasi penerimaan (Purnomo, 2025). Dengan pengelolaan yang optimal, diharapkan retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap PAD (Putri, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pengelolaan dan pencatatan retribusi parkir yang diterapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, khususnya pada proses penyeteroran dan pencatatan penerimaan. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada peran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan retribusi parkir serta adanya berbagai permasalahan di lapangan yang menjadikannya relevan sebagai objek kajian. Selain itu, potensi retribusi parkir di wilayah Kabupaten Bangkalan yang cukup besar, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, menjadi alasan penting dalam pemilihan lokasi kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan retribusi parkir serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

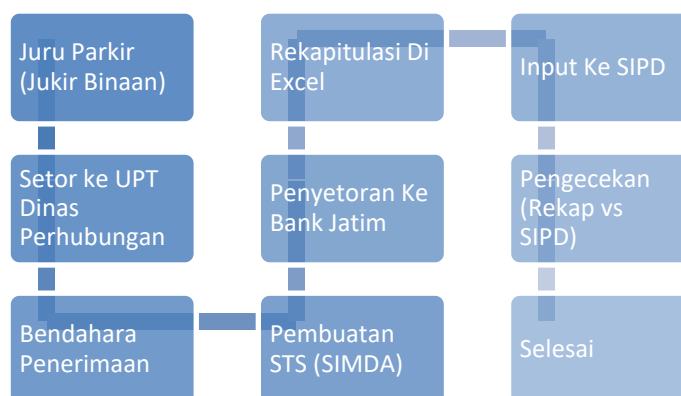
METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Fokus kegiatan berada pada proses administrasi penerimaan retribusi parkir, khususnya pada tahap rekapitulasi dan pencatatan data penerimaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi langsung terhadap proses yang berjalan di bagian bendahara penerimaan. Data diperoleh melalui pengamatan terhadap alur pengelolaan retribusi parkir yang berlangsung, mulai dari proses pemungutan oleh petugas parkir, penyeteroran hasil pungutan, hingga proses rekapitulasi oleh bendahara penerimaan. Dalam mendukung proses pencatatan dan pengolahan

Kegiatan magang mahasiswa : prosedur pencatatan dan pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

data, digunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mempermudah penginputan, pengelompokan, dan perhitungan data penerimaan.

Tahapan kegiatan dimulai dengan memahami alur administrasi penerimaan yang berlaku di instansi. Selanjutnya, dilakukan pencatatan dan pengelompokan data berdasarkan laporan yang diterima dari petugas lapangan. Data tersebut kemudian direkap secara manual sebagai dasar penyusunan laporan penerimaan. Selama proses berlangsung, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian antara data yang diterima dengan hasil rekapitulasi. Data yang diperoleh kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai proses pengelolaan dan pencatatan retribusi parkir yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.



Gambar 1. Alur Pengelolaan dan Pencatatan Retribusi Parkir.

Berdasarkan Gambar 1, proses pengelolaan retribusi parkir dimulai dari juru parkir binaan yang menyetorkan hasil pungutan kepada pihak UPT Dinas Perhubungan. Selanjutnya, setoran tersebut diserahkan kepada bendahara penerimaan untuk dilakukan pencatatan dan pengadministrasian awal. Bendahara penerimaan kemudian membuat Surat Tanda Setoran (STS) menggunakan aplikasi SIMDA sebagai dasar dalam proses penyetoran ke bank.

Setelah STS diterbitkan, dana retribusi disetorkan ke Bank Jatim. Data penerimaan yang telah disetorkan kemudian direkap menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan pengelompokan berdasarkan jenis akun. Selanjutnya, data tersebut diinput ke dalam sistem SIPD sebagai bagian dari pelaporan keuangan daerah. Tahap akhir adalah melakukan pengecekan ulang antara data pada SIPD dengan hasil rekapitulasi untuk memastikan kesesuaian dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Dengan adanya tahapan tersebut, proses pengelolaan dan pencatatan retribusi parkir dapat dilakukan secara sistematis dan terkontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, diketahui bahwa proses pengelolaan retribusi parkir telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ada, mulai dari pemungutan oleh juru parkir, penyetoran kepada pihak UPT, hingga pencatatan oleh bendahara penerimaan. Dalam pelaksanaannya, bendahara penerimaan melakukan pencatatan dan pengadministrasian data setelah menerima setoran dari petugas lapangan, kemudian dibuat Surat Tanda Setoran (STS) menggunakan aplikasi SIMDA sebagai dasar penyetoran ke Bank Jatim. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan setoran dari petugas lapangan yang dapat mempengaruhi waktu pencatatan. Dalam beberapa kondisi, keterlambatan tersebut terjadi akibat kelalaian petugas parkir, sehingga penerimaan pada hari yang bersangkutan tidak dapat langsung dicatat dan diinput ke dalam sistem. Akibatnya, pencatatan baru dilakukan pada hari berikutnya dan menyebabkan penumpukan data rekapitulasi dengan penerimaan hari selanjutnya, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, karena masih menggunakan sistem

manual, potensi kesalahan dalam penginputan data juga masih dapat terjadi apabila tidak dilakukan pengecekan secara teliti.

Pencatatan dilakukan secara bertahap, yaitu harian untuk penerimaan rutin, mingguan untuk kegiatan insidental seperti *Car Free Day*, serta bulanan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Data yang telah direkap kemudian diinput ke dalam sistem SIPD sebagai bagian dari pelaporan keuangan daerah. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu dalam pencatatan data penerimaan.

Gambar 2. Contoh Pencatatan Retribusi Parkir Menggunakan Microsoft Excel

Berdasarkan Gambar 2, pencatatan retribusi parkir dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu utama dalam proses rekapitulasi data penerimaan. Data yang dicatat meliputi tanggal setoran, keterangan sumber penerimaan, serta jumlah uang yang diterima. Pencatatan ini dilakukan secara rutin setiap kali terdapat setoran dari petugas lapangan.

Dalam praktiknya, data yang masuk tidak langsung dijadikan laporan, tetapi terlebih dahulu dilakukan pengecekan ulang oleh bendahara penerimaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah setoran yang diterima sesuai dengan data yang disampaikan oleh petugas parkir. Setelah data dinyatakan sesuai, kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis penerimaan agar lebih mudah dalam proses perhitungan dan penyusunan laporan. Penggunaan Microsoft Excel dinilai cukup membantu karena dapat mempermudah proses perhitungan jumlah total penerimaan secara otomatis. Selain itu, fitur tabel yang tersedia juga memudahkan dalam pengelompokan data sehingga proses rekapitulasi menjadi lebih rapi dan terstruktur. Meskipun demikian, karena prosesnya masih dilakukan secara manual, ketelitian dalam menginput data tetap sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan pencatatan.

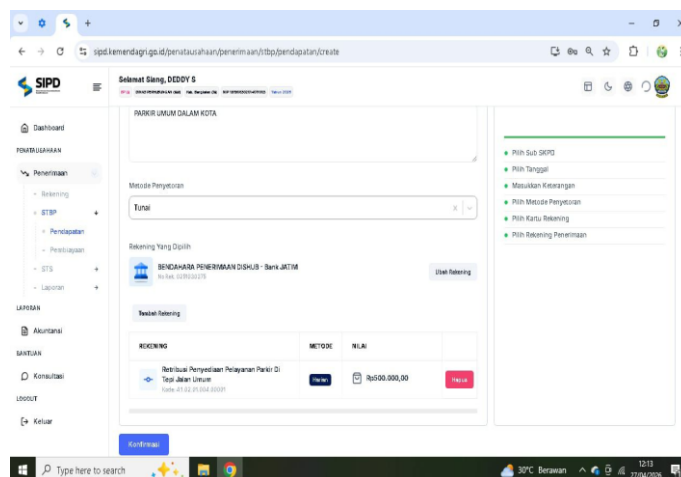
Selanjutnya, data hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, seperti Buku Kas Umum (BKU), Rekap Penerimaan hingga SPJ bulanan. Data yang telah tersusun kemudian diinput ke dalam sistem SIPD sebagai bagian dari pelaporan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, proses penginputan data ke dalam sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak selalu berjalan lancar. Terkadang terjadi kendala teknis berupa sistem yang mengalami error atau sulit diakses, sehingga proses input data tidak dapat dilakukan secara langsung. Apabila terjadi error, maka proses penginputan akan ditunda hingga sistem kembali normal. Setelah sistem dapat diakses kembali, dilakukan penginputan data serta pengecekan ulang untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau perbedaan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala teknis pada sistem masih menjadi salah satu hambatan dalam proses pelaporan, sehingga diperlukan ketelitian dalam setiap tahap penginputan data.

Sehubungan dengan hal tersebut, proses penginputan data penerimaan retribusi parkir melalui fitur STBP Pendapatan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat dilihat pada Gambar 3. Dalam pelaksanaannya, bendahara penerimaan melakukan penginputan data melalui fitur STBP (Surat Tanda Bukti Penerimaan) pada menu pendapatan yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penerimaan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penginputan STBP Pendapatan, terdapat beberapa fitur yang digunakan, yaitu memilih Sub SKPD untuk menentukan unit kerja penerima pendapatan, menginput tanggal transaksi penerimaan, mengisi

Kegiatan magang mahasiswa : prosedur pencatatan dan pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

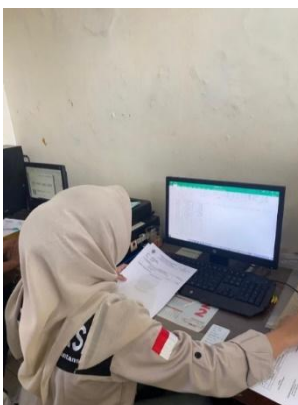
keterangan terkait sumber pendapatan, memilih metode penyetoran (tunai atau transfer), menentukan kartu rekening serta rekening penerimaan sesuai kode akun pendapatan daerah, menginput nilai pendapatan, serta melakukan konfirmasi untuk menyimpan dan memproses data transaksi. Selain STBP Pendapatan, dalam aplikasi SIPD juga terdapat menu lain yang berkaitan dengan proses penatausahaan penerimaan daerah, yaitu STBP Pembiayaan yang digunakan untuk mencatat transaksi pembiayaan daerah, serta STS (Surat Tanda Setoran) yang digunakan dalam proses penyetoran penerimaan ke kas daerah.

Setelah seluruh data penerimaan diinput melalui fitur STBP Pendapatan, operator melakukan proses *upload* dan *approve* sebagai bentuk verifikasi terhadap data yang telah dimasukkan. Selanjutnya, data yang telah disetujui akan dilakukan proses *posting*, yaitu tahap dimana sistem secara otomatis membentuk jurnal akuntansi. Data yang telah terjurnal tidak dapat diubah secara langsung oleh pengguna, sehingga apabila terjadi kesalahan pencatatan, perbaikan hanya dapat dilakukan melalui koordinasi dengan operator SIPD yang berwenang. Melalui tahapan tersebut, penggunaan SIPD dalam pencatatan penerimaan daerah mampu mendukung proses administrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta meminimalisir terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 3. Tampilan Menu STBP Pendapatan pada Aplikasi SIPD

Berdasarkan Gambar 3, tampilan menu STBP Pendapatan pada aplikasi SIPD digunakan oleh bendahara penerimaan dalam proses penginputan data penerimaan retribusi parkir sebagai bagian dari pelaporan keuangan daerah.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Rekapitulasi Data Penerimaan Retribusi Parkir

Berdasarkan Gambar 4, kegiatan rekapitulasi data penerimaan retribusi parkir dilakukan dengan mencocokkan data penerimaan yang telah dicatat pada Microsoft Excel dengan data yang diinput ke dalam aplikasi SIPD untuk memastikan tidak terjadi selisih data. Proses pencocokan ini menjadi

Kegiatan magang mahasiswa : prosedur pencatatan dan pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

langkah penting dalam menjaga akurasi dan konsistensi data penerimaan, mengingat adanya potensi keterlambatan setoran maupun kendala teknis pada sistem yang dapat mempengaruhi ketepatan pencatatan. Secara keseluruhan, prosedur pencatatan retribusi parkir yang diterapkan sudah cukup sistematis, mulai dari penerimaan, pencatatan, hingga pelaporan. Dengan demikian, diperlukan ketelitian dan kedisiplinan dalam setiap tahap pencatatan agar data penerimaan yang dihasilkan lebih akurat. Pengelolaan administrasi yang lebih tertib diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan magang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan dan pencatatan retribusi parkir telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Proses tersebut dimulai dari pemungutan oleh juru parkir, kemudian penyeteroran ke pihak UPT, hingga pencatatan oleh bendahara penerimaan. Dalam prosesnya, pencatatan dilakukan secara bertahap dan dibantu dengan penggunaan Microsoft Excel untuk mempermudah rekapitulasi data penerimaan. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan proses pengelolaan dan pencatatan retribusi parkir. Pertama, perlu adanya peningkatan kedisiplinan petugas lapangan dalam melakukan penyeteroran agar proses pencatatan dapat dilakukan secara tepat waktu. Kedua, perlu dilakukan pengecekan data secara rutin antara hasil rekapitulasi dengan data pada sistem SIPD untuk menghindari terjadinya selisih data. Ketiga, peningkatan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penyeteroran juga sangat diperlukan agar penerimaan retribusi parkir dapat lebih maksimal dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang serta atas dukungan berupa data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan selama pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan artikel ini. Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam memahami proses pengelolaan dan pencatatan retribusi parkir secara langsung di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Hermansyah, M., & Tohardi, A. (2026). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau*. 5(1), 493–500.
- Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466–479.
- Marau, M. D., Djaber, Y. S., Ilmu, F., Politik, I., Azis, U. A., Suharso, J., Barat, B., & Timur, P. (2025). KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG. *Jurnal FISIP JSPSR*, 1(2), 1–20.
- Purnamasari. (2015). Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(10).
- Purnomo. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Pengelolaan Parkir Umum Pinggir Jalan yang Efektif dan Efisien. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 77–86. <https://doi.org/10.65310/4fwq3s88>
- Putri. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam (JMEBI)*, 01(01), 1–13.

Kegiatan magang mahasiswa : prosedur pencatatan dan pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

-
- Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–9.
- Rahmatilah, M., Sugianor, S., & Anjasmari, N. M. M. (2025). Pengelolaan Retribusi Parkir Di Taman Putri Junjung Buih Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 2(1), 25–34.
- Widiarta, W. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Parkir Terhadap Layanan Publik di Kota Medan. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2).
- Zega, at all. (2025). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 361–379.